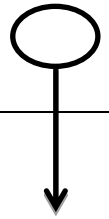
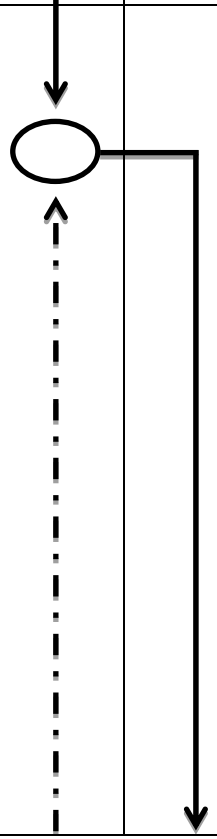
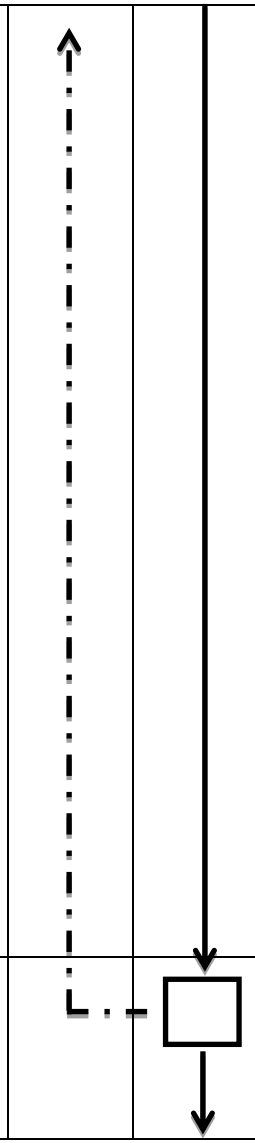
KANTOR WILAYAH KEMENETRIAN HUKUM DAN HAM RIAU DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM BIDANG HUKUM SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM DAN JDIH	**Nomor SOP**	W4-HN.03.05-0309
	Tanggal Pembuatan	15 Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tangga Efektif	
	Disahkan Oleh	Januari s.d Desember 2024
		Kepala Kantor Wilayah #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **BUDI ARGAP SITUNGKIR** **NIP. 197510211998031001**
	Nama : SOP verifikasi dan akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum	

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 3. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan. 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukumdan HAM RI. 5. Petunjuk Pelaksanaan Nomor : PHN-HN.04.03-812 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.	1. Mampu mengoperasikan computer. 2. Memahami Aplikasi Verifikasi dan Akreditasi (VERASI). 3. Memahami rangkaian proses Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 2. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 3. Unit-unit kerja terkait	1. Komputer 2. Koneksi Internet 3. Aplikasi Verasi 4. Sarana/Prasarana lainnya
Peringatan	**Pencatatan/pendataan**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Verifikasi, Akreditasi, dan	Disimpan sebagai data elektronik dan cetak

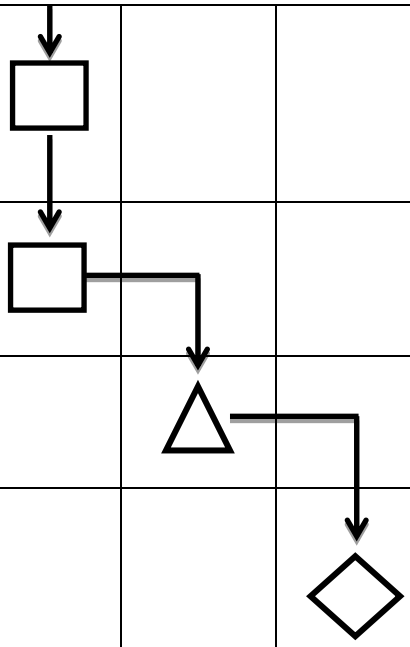
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum akan terhambat.									
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		CPBH	Pokjada	Pokjapus	Panitia Verasi	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1	CPBH melakukan Registrasi pada aplikasi Verasi					• Alamat email CPBH		Akun CPBH pada aplikasi Verasi	
2	CPBH Login dan melengkapi data pada aplikasi Verasi					• Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; • Akta pendirian dan pengurus OBH; • Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus yang terdiri dari Ketua,Sekretaris, dan Bendahara pada OBH; • Surat penunjukan sebagai Advokat pada OBH; • Surat penunjukan sebagai Paralegal pada OBH; • Surat penunjukan Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi yang bukan sebagai Advokat dan		Data terkirim ke Pokjada	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

						Paralegal pada OBH; • Surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku; • Berita acara sumpah Advokat; • Dokumen status kepemilikan kantor; • Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam; • Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH; • Nomor Rekening atas nama OBH; • Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada; • Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; • Laporan pengelolaan keuangan; • Bukti pelaksanaan bantuan hukum untuk kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi terhadap orang miskin.			
3	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran						14 (empat belas) hari	Dokumen pendaftaran sesuai/tidak dengan aturan yang berlaku	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

4	Pemeriksaan Dokumen Fisik							Dokumen pendaftaran sesuai/tidak dengan aturan yang berlaku	
5	Pemeriksaan Faktual Lapangan							Kondisi kantor sesuai/tidak dengan aturan yang berlaku	
6	Rekomendasi Verifikasi								
7	Pengklasifikasian Akreditasi							SK Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Periode 2025-2027	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi